

Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Asyaima Labibah Iqbal^{1,*}, Athaya Rasyaad Akmal², Muhammad El Hakam Hilmy³,
Fitra Deni⁴

^{1 2 3 4} Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

*Alamat email koresponden: asyaima.iqbal23@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study explores the significant decline in the human rights situation in Papua since 2018, marked by increased conflict and human rights violations by security forces. The research aims to understand the complexity of this phenomenon and identify potential solutions. A qualitative method was used, with descriptive data from previous studies, human rights reports, and official documents. The findings indicate that the conflict has led to killings, enforced disappearances, and torture, with existing law enforcement efforts proving unsatisfactory. The discussion reveals that the conflict also impacts education, health, and natural resource management, exacerbating poverty and hindering sustainable development. The study concludes that legal reform and a more sensitive approach to the local context are necessary to address human rights issues in Papua, as well as the importance of sustainable development that considers environmental conservation and the welfare of the local community. The government has taken significant steps to improve health infrastructure and access to services. Still, a more substantial commitment is needed to ensure the fulfillment of the fundamental rights of the Papuan people.

Keywords: government policy, Papua conflict, human rights violations

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penurunan signifikan dalam situasi hak asasi manusia di Papua sejak 2018, yang ditandai dengan peningkatan konflik dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami kompleksitas fenomena ini dan mengidentifikasi solusi potensial. Metode kualitatif digunakan, dengan data deskriptif dari studi terdahulu, laporan HAM, dan dokumen resmi. Hasil menunjukkan bahwa konflik telah menyebabkan pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan, dengan upaya penegakan hukum yang ada belum memuaskan. Pembahasan mengungkapkan bahwa konflik juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam, memperburuk kemiskinan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi hukum dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal untuk mengatasi masalah HAM di Papua, serta pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan dan akses ke layanan, namun diperlukan komitmen yang lebih besar untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga Papua.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, konflik Papua, pelanggaran HAM

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang tersedia, situasi hak asasi manusia di Tanah Papua menunjukkan tren yang semakin memburuk jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak Desember 2018, keadaan di Tanah Papua telah mengalami kemerosotan yang signifikan. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa situasi tersebut akan semakin memburuk pada tahun 2023. Indikator-indikator seperti jumlah pembunuhan di luar hukum,

penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi wilayah tersebut, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. (Human Rights Monitor, 2023). Lebih lanjut, dilaporkan adanya kekerasan serius dalam konflik di wilayah Daerah Papua, yang meliputi kematian atau cedera secara melanggar hukum, penyiksaan, dan kekerasan fisik terhadap warga sipil. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan permasalahan hak asasi manusia yang signifikan dan membutuhkan perhatian serta tindak lanjut yang serius (US embassy, 2023). Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada Februari 2020, lembaga tersebut menetapkan bahwa peristiwa yang terjadi di Paniai pada tanggal 7-8 Desember 2014 merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Penetapan ini dilakukan Komnas HAM menyusul temuan yang diperoleh oleh tim investigasi mereka (BBC, 2022). Berdasarkan data yang tersedia, ditemukan bahwa pelaku yang berasal dari lembaga kepolisian atau tentara jarang diadili di pengadilan umum melalui persidangan terbuka. Pengadilan militer dan prosedur disipliner kepolisian melalui PROPAM tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi para korban. Selain itu, investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga belum transparan (Human Rights Monitor, 2023). Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang ada, sehingga diperlukan adanya reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di wilayah konflik Papua.

Upaya penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Papua telah dilakukan melalui beberapa mekanisme, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat di Papua, tetapi hingga saat ini belum dibentuk secara resmi (ELSAM, 2019). Pada kurun waktu tahun 2000-an, Pengadilan HAM Indonesia menjadi bahan perbincangan yang intens di kalangan akademisi. Namun, setelah periode tersebut, keberadaan dan pembahasan mengenai Pengadilan HAM Indonesia seolah tenggelam dan tidak terdengar lagi secara aktif (The Conversation, 2023). Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, pengadilan khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia hanya berhasil menyelesaikan empat kasus sejak didirikan. Dua kasus telah ditangani oleh Pengadilan HAM ad hoc, yaitu kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, sementara dua kasus lainnya telah ditangani oleh Pengadilan HAM Permanen, yaitu kasus Abepura dan Paniai di Provinsi Papua. Semua kasus ini terjadi setelah tahun 2000 (The Conversation, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam kompleksitas fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua. Pendekatan kualitatif dipilih untuk dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan latar belakang permasalahan tersebut. Data yang digunakan bersifat deskriptif, diperoleh dari berbagai studi terdahulu, laporan organisasi hak asasi manusia, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang ekstensif, termasuk publikasi akademis, arsip berita, dan laporan pemerintah serta lembaga non-pemerintah.

Analisis data dilakukan secara iteratif dan reflektif, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang holistik tentang situasi hukum dan hak asasi manusia di Tanah Papua. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi

pola, tema, dan narasi yang muncul dari data, yang kemudian digunakan untuk menguatkan argumen dan menyusun kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif lokal dan konteks sosial-politik yang mempengaruhi dinamika konflik dan penegakan hukum di Tanah Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Papua dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya dalam hal mineral logam. Berdasarkan data dari Geoportal Kementerian ESDM, terdapat sedikitnya 57 titik potensi mineral logam yang tersebar di berbagai daerah seperti Mimika, Intan Jaya, Paniai, dan Nabire. Mineral yang ditemukan mencakup emas, nikel, pasir besi, perak, seng, dan tembaga. Emas sebagai salah satu mineral dengan konsentrasi tinggi, terutama di Paniai. Emas primer, yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung emas, serta emas yang terdapat pada retakan batuan kuarsa menjadi fokus dalam eksplorasi, PT Freeport Indonesia saat ini merupakan pemegang izin pertambangan dengan luas total 121.132 hektare yang mencakup dua wilayah, yaitu Mimika dan Paniai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk pengembangan sektor pertambangan di Papua, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat (Hutabarat, 2022).

Kawasan tersebut didominasi oleh bentang alam hutan yang rencananya akan diperluas hingga ke provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini, pelepasan akumulasi kawasan hutan di kabupaten ini mencapai kurang lebih 715.482 hektar berdasarkan data SIGAP KLHK tahun 2022. Areal deforestasi ini terjadi di Merauke, Boven Digoeli dan Mappi. Sejauh ini sedikitnya 26 perusahaan telah memiliki surat keputusan pelepasan kawasan hutan. Pencarian informasi akan memunculkan beberapa perusahaan Pelayaran Kehutanan yang beroperasi di lebih dari satu wilayah Wilayah Selatan. (Hutabarat, 2022).

Di sisi lain, aktivitas perkebunan kelapa sawit telah menjadi kontributor utama emisi di kawasan hutan Papua, mengubah lanskap hutan menjadi lahan pertanian. Upaya diversifikasi dengan penanaman komoditas lain seperti tebu, karet, dan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai juga telah dilakukan. Namun, ini tidak mengurangi fakta bahwa deforestasi terjadi di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dengan pelepasan akumulasi kawasan hutan mencapai 1.670.091 hektar.. Sebanyak 13 perusahaan di Boven Digoel, Mappi, dan Merauke telah memperoleh izin pemanfaatan hutan, sementara tujuh perusahaan di Papua Tengah juga telah mendapatkan izin untuk membuka kawasan hutan, menambahkan emisi terakumulasi dari kawasan hutan hingga 180.494 hektar. Izin ini meliputi wilayah Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Intan Jaya. Empat perusahaan diantaranya telah diberikan hak untuk memanfaatkan hutan seluas 421.866 hektar. Namun, wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua masih belum tergali potensi alamnya (Hutabarat, 2022).

Meskipun telah terjadi eksploitasi sumber daya alam, wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua masih menyimpan potensi alam yang belum tergali. Ini menunjukkan bahwa sementara beberapa area telah mengalami eksploitasi, masih ada wilayah yang belum dieksplorasi yang mungkin menyimpan kekayaan alam yang belum terungkap. Keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi sumber daya alam di Papua dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan lingkungan secara keseluruhan.

Permasalahan HAM di Papua

Permasalahan hak asasi manusia (HAM) di Papua merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Wilayah Papua telah menjadi sorotan terkait berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di sana. Beberapa permasalahan HAM yang menjadi perhatian utama adalah konflik bersenjata antara kelompok separatis dan aparat keamanan, serta diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat (Amnesty International, 2022). Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua telah menyebabkan hilangnya nyawa, pengungsian warga sipil, dan pelanggaran HAM lainnya. Kelompok separatis Papua yang berjuang untuk kemerdekaan seringkali berhadapan dengan tindakan represif dari aparat keamanan pemerintah, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Selain itu, masyarakat adat di Papua juga menghadapi diskriminasi, perampasan tanah, dan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif dalam upaya eksploitasi sumber daya alam (Amnesty International, 2022). Permasalahan HAM di Papua ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan yang lebih efektif bagi hak-hak dasar masyarakat, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan kerja sama yang lebih konstruktif antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang bersengketa.

Upaya penyelesaian masalah ini mencakup penghentian konflik bersenjata dan pemantauan upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, masih terdapat tantangan dalam akses pendidikan dan kesehatan yang minim, serta peristiwa kelaparan yang terus berulang, yang semakin memperburuk kondisi HAM di Papua. Pembangunan yang berkelanjutan dan penanganan yang efektif terhadap pelanggaran HAM di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal.

Dampak konflik di Papua

Papua, wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, saat ini menghadapi tantangan besar akibat konflik berkepanjangan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, banyak daerah terpencil di Papua yang sulit dijangkau, terutama daerah pegunungan, sehingga menyulitkan anak-anak untuk pergi ke sekolah mereka. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya sekitar 60% anak usia sekolah di Papua yang memiliki akses ke sekolah dasar, dan angka ini akan terus menurun setiap kenaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi (LAPORAN KINERJA 2022, 2023). Disamping jumlah anak-anak Papua yang sudah mempunyai tempat untuk menunjang pendidikan, tercatat sebanyak 70% anak-anak Papua kesulitan karena jarak tempuh terbilang jauh menuju Papua. dan juga 8% lainnya tidak punya akses ke sekolah manapun. dalam kisaran waktu mereka rata-rata bisa menempuh waktu paling tidak 2 jam untuk menuju sekolah (Hidayat, Shofwan. 2023).

Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, seperti jalan dan jembatan yang rusak serta fasilitas sekolah yang tidak layak, memperburuk situasi. Sekitar 80% bangunan sekolah di Papua dinilai sangat tidak layak, dengan 7.628 ruangan kelas SD yang rusak, 2.246 di tingkat SMP, dan 1.158 pada SMA (Hidayat, Shofwan. 2023). Kualitas pendidikan yang rendah, ditandai dengan kurangnya minat profesi sebagai guru, terutama di daerah terpencil,

menambah kompleksitas masalah. Di Jayapura, misalnya, jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, tercatat jumlah guru sebanyak 831 orang dan sementara jumlah siswa mencapai 19.418 orang. Selain itu, kesulitan menggaji guru honorer karena keterbatasan ekonomi menjadi faktor kekurangan peran guru di sekolah-sekolah setempat (Hidayat, Shofwan. 2023).

Insiden kekerasan dan bentrokan di dekat bangunan sekolah sering terjadi, memaksa sekolah untuk ditutup sementara demi keselamatan anak-anak (Sigiro, 2023). Di kampung Komailen Papua, terdapat guru yang hampir ditangkap oleh Tentara Papua Nugini, menunjukkan risiko yang dihadapi oleh pendidik di wilayah konflik (Jati, Eva. 2024). Di sisi lain, Papua menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi warganya. Akses layanan kesehatan yang terbatas, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan, serta keterbatasan infrastruktur dan transportasi umum, membuat biaya dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat miskin (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Provinsi Papua memiliki 39 rumah sakit dan 462 puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan dasar, namun distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022). Dan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, Papua juga memiliki 1.856 Poskesdes yang dikelola oleh tenaga kesehatan setempat. Poskesdes menyediakan layanan kesehatan dasar dan merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit jika diperlukan (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022). Namun keterbatasan infrastruktur, akses, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Konflik yang berkepanjangan juga telah berdampak pada deforestasi dan pengelolaan lahan untuk produksi kelapa sawit, yang berkontribusi pada masalah kemiskinan. Kemiskinan yang kronis dan kompleks di Papua menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan (Tambun dan Herawaty, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial jangka panjang yang sangat kronis dan kompleks. Penanggulangan kemiskinan masih sangat sulit sehingga diperlukan tahapan analisis yang tepat, tidak bersifat sementara dan berkesinambungan untuk mengatasinya (Ahmaddien, 2019). Kemiskinan di Papua, yang disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan gizi yang baik, menurunkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas (Agus Triono et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa belum tercapainya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu tanpa kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Papua adalah belum terselesaikannya permasalahan perekonomian Indonesia, khususnya di provinsi tersebut. Meskipun kaya akan potensi sumber daya alam, Papua masih belum mampu mengelola dan mengedepankan potensi yang dimiliki, terlihat dari tingginya angka kemiskinan di provinsi ini. Pembangunan yang berkelanjutan di Papua harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan lingkungan secara keseluruhan.

Upaya Pemerintah

Dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan

kondisi di wilayah tersebut, khususnya dalam sektor kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan poskesdes, serta memperbaiki akses jalan dan transportasi ke daerah-daerah terpencil (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Papua memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang layak Peningkatan Distribusi Tenaga Kesehatan. Untuk meningkatkan distribusi tenaga kesehatan, pemerintah telah menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil melalui program Nusantara Sehat dan memberikan insentif bagi mereka yang bertugas di Papua (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022).. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menjadi prioritas, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih luas dan terjangkau. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi, seperti telemedicine, telah diperkenalkan untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap pelayanan kesehatan spesialis (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022). Ini memungkinkan diagnosa dan konsultasi medis jarak jauh, yang sangat membantu di daerah dengan keterbatasan tenaga medis spesialis. Peningkatan Anggaran Sektor Kesehatan.

Selain itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan di Papua, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengatasi masalah kesehatan tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang dapat berkontribusi pada pelanggaran HAM. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan situasi di Papua dapat terus membaik dan hak-hak dasar warganya dapat terpenuhi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Papua telah mengalami penurunan signifikan, dengan peningkatan konflik dan pelanggaran HAM yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan transparan. Penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang komprehensif, menyoroti pentingnya reformasi sistem penegakan hukum dan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal untuk mengatasi permasalahan HAM di Papua. Selain itu, dampak konflik pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan merupakan langkah positif, namun diperlukan komitmen yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua warga Papua dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Selain itu, diperlukan adanya reformasi sistem penegakan

hukum yang lebih independen, imparial, transparan, dan akuntabel, serta upaya-upaya konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua secara adil dan komprehensif.

REFERENSI

- Ahmaddien, I. (2019). Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan jawa barat dengan regresi data panel. *Forum Ekonomi*, 21(1), 87-96.
- Amnesty International Indonesia. (2018). "Don't bother, just let him die": Killing with impunity in Papua. Index: ASA 21/8198/2018. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/en/>
- Arief, A. M. P., Ayatullah, D., Pramesti, S. A., Hidayat, S., & Pramaditya, Y. A. (2024). Pendidikan di papua dalam sudut pandang hak asasi manusia. *Issuu*. <https://issuu.com/shofwanhid/docs/pendidikan-di-papua-dalam-sudut-pandang-hak-asasi>
- Amnesty International. (2023). Indonesia. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- Efendi. (2017). Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam (Studi Perspektif Politik Pembangunan Hukum). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (58).
- Hutabarat, J. (2022). Ancaman Eksploitasi Sumber Daya di Balik Pemekaran Papua. *Tirto.id*. <https://tirto.id/ancaman-eksploitasi-sumber-daya-di-balik-pemekaran-papua-gs7K>
- Human Rights Watch. (2024). Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua. Diakses dari <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-tahunan-2023-hak-asasi-manusia-dan-konflik-di-tanah-papua/>
- International Crisis Group. (2019). Papua's Deadly Escalation. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/b154-papuas-deadly-escalation>
- Kapolres: Three Elementary School Teachers in Keerom, Papua Narrowly Escaped Capture by PNG Military (Kapolres: Tiga guru SD Keerom Papua nyaris ditangkap tentara PNG) *Antar News Papua*. (2024). Kapolres: Tiga guru SD Keerom Papua nyaris ditangkap tentara PNG [Kapolres: Three elementary school teachers in Keerom, Papua narrowly escaped capture by PNG military]. <https://papua.antaranews.com/berita/721920/kapolres-tiga-guru-sd-keerom-papua-nyaris-ditangkap-tentara-png>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-21-2020/>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2023). Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia 2023. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-indonesia-2023/>
- Laporan Kinerja 2022*. (2023). Website Biro Organisasi dan Tata Laksana. Retrieved July 14, 2024, from

<https://ortala.kemdikbud.go.id/storage/img/1DNR8cpOBx28VBQkvc09BfqtzriMBVmX89g7Ke7i.pdf>

- Rahmadani, A. S., Widyastuti, & Asri, A. (2019). Karakteristik Psikometri pada Standard Progressive Matrices (SPM). *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 8(2), 59-66. <https://doi.org/10.21009/JPPP.082.01>
- Sigiro, A. N. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022*. Komnas HAM. Retrieved July 14, 2024, from <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html>
- Sucahyo, N. (2019). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua: Seperti Bangun dari Tidur Panjang. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-papua-seperti-bangun-dari-tidur-panjang/5143531.html>
- Suwartono, R. D. B. (2023). Indonesia sudah lama punya Pengadilan HAM sendiri. Mengapa kiprahnya jarang terdengar?. *The Conversation*. <https://theconversation.com/indonesia-sudah-lama-punya-pengadilan-ham-sendiri-mengapa-kiprahnya-jarang-terdengar-209187>
- Tambun, J. M. S., & Herawaty, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 100-110.